



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EVITA WAHYU PANCAWATI
2. Jabatan : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. TANJUNG PRIOK
3. NHK : 861512

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.453.792.000

1. Tanah Seluas 350 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah Seluas 498 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 486 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m²/543 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.259.900.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m²/24 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 302.645.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m²/45 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 408.173.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 55 m²/50 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m²/290 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.135.250.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/70 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 37.824.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 162.000.000



1.	MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.	
	122.000.000	
2.	MOTOR, HONDA MATIC / SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.	
	14.500.000	
3.	MOTOR, HONDA MATIC / SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.	
	25.500.000	
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. ---
D.	SURAT BERHARGA	Rp. ---
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp. 69.453.726
F.	HARTA LAINNYA	Rp. ---
Sub Total		Rp. 4.685.245.726
III. HUTANG		Rp. ---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp. 4.685.245.726

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.